



The Role of the Gayo Lues District Government in Handling Road Damage in Umelah Village, Blang Pegayon Subdistrict, Aceh Province

Nelly Yunita¹, Artha Dini Akmal²

[*nellyyunita563@gmail.com](mailto:nellyyunita563@gmail.com)

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Gayo Lues Regency Government in handling road damage and its impact on community activities in Umelah Village, Blang Pegayon District. The current condition of the roads in Umelah Village is very concerning because they are potholed, gravelly, and slippery when it rains, thereby hampering community activities in the economic, educational, and public service sectors. This study uses Michael Todaro's (1998) theory, which explains the role of government in infrastructure development, including the provision of facilities and infrastructure, improving community efficiency and productivity, public accessibility, and coordination and resource management. Based on interviews with the Public Works Office, the Blang Pegayon Sub-District Head, the Umelah Village Head, KUA (Office of Religious Affairs) employees, and the community, it was found that the government has taken initial steps such as surveying and measuring the roads, but repairs have not been carried out due to budget constraints, damaged equipment, and development priority policies. As a result, community activities have been disrupted and their welfare has declined. Greater attention is needed from the government in terms of equitable development so that infrastructure can be enjoyed fairly by the entire community.

Keywords : The Role of Government, Infrastructure, Damaged Roads, Community, Gayo Lues

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus, sehingga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan secara mandiri. Provinsi ini terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan terdiri atas 23 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Gayo Lues yang berada di wilayah pegunungan. Sebagai daerah berstatus otonomi khusus, Aceh memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional (Sanur, 2020). Namun, Kabupaten Gayo Lues masih menghadapi tantangan besar dalam sektor infrastruktur, khususnya kondisi jalan yang banyak mengalami kerusakan dan menghambat aktivitas masyarakat (Jumiana et al., 2018). Pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pemeliharaan jalan melalui Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan 2023–2026 yang menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur jalan.

Jalan memiliki peran vital dalam menunjang kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat karena berfungsi mempermudah mobilitas barang dan orang (Kamaruddin et al., 2021). Infrastruktur jalan yang baik mampu mendorong kemajuan wilayah pedesaan, sedangkan jalan yang rusak dapat menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik (Lestari et al., 2023). Jalan juga tergolong sebagai fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk disediakan dan dirawat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menekankan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menjaga aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan dan pemeliharaan jalan (Ruben et al., 2024).

Selain sebagai sarana transportasi, keberadaan jalan juga menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi daerah karena mendukung pertumbuhan aktivitas masyarakat serta memperkuat hubungan antarwilayah (Nasution & Siregar, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan jalan perlu dilakukan dengan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang baik. Sebaliknya, kelalaian pemerintah dalam pengelolaan jalan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan masyarakat dan meningkatnya biaya transportasi (Ruben et al., 2024). Dalam konteks pembangunan, pemerintah berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, dan fasilitator dalam memastikan infrastruktur dapat berfungsi optimal (Lestari et al., 2023).

Desa Umelah di Kecamatan Blang Pegayon merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Gayo Lues yang mengalami masalah serius terkait kerusakan jalan. Walaupun jaraknya relatif dekat dengan pusat pemerintahan di Blangkejeren, kondisi jalan menuju desa ini masih sangat buruk. Kerusakan jalan tersebut menyebabkan petani kesulitan membawa hasil panen, siswa kesulitan berangkat ke sekolah, dan pegawai KUA kesulitan mencapai kantor. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Umelah, Bapak Udat, jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat menuju ladang, sekolah, dan desa tetangga Kutebukit dusun Kreteng. Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan dua kali survei lapangan pada tahun 2023, namun hingga kini perbaikan jalan belum juga dilaksanakan.

Dengan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Penanganan Kerusakan Jalan di Desa Umelah Kecamatan Blang Pegayon, Provinsi Aceh.” Permasalahan yang dikaji meliputi dua hal, yaitu (1) bagaimana peran pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menangani kerusakan jalan di Desa Umelah, dan (2) faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemerintah dalam menangani jalan rusak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memahami peran pemerintah dan hambatan yang dihadapi dalam proses perbaikan jalan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi negara (Mulyadi, 2013), sementara secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Blang Pegayon dan masyarakat agar lebih memperhatikan kebijakan pemeliharaan jalan di Desa Umelah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi nyata di lapangan terkait penanganan kerusakan jalan di Desa Umelah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap dan relevan mengenai peran pemerintah serta situasi yang dialami masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan berdasarkan pengalaman langsung para informan di lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian ini mencakup pihak dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gayo Lues), Camat Blang Pegayon, Kepala Desa Umelah, pegawai KUA Kecamatan Blang Pegayon, serta masyarakat dan petani setempat. Data yang terkumpul

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan fokus untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan perbaikan jalan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi aktual di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi jalan di Desa Umelah sangat buruk dan belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan survei dan pengukuran, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Berdasarkan teori Todaro, peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat belum berjalan maksimal, karena pemerintah belum mampu memenuhi fungsi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan secara merata. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Desa Umelah masih mengalami hambatan dalam mobilitas, aktivitas ekonomi, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya dapat ditunjang oleh infrastruktur jalan yang memadai.

b. Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Masyarakat

Kerusakan jalan berdampak besar terhadap produktivitas masyarakat, terutama petani dan pegawai pemerintah. Petani mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil panen ke pasar, sehingga pendapatan mereka menurun karena biaya transportasi meningkat dan waktu distribusi menjadi lebih lama. Sementara itu, pegawai KUA juga terhambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena akses jalan yang rusak memperlambat mobilitas mereka. Kondisi ini mengurangi efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi maupun sosial di desa. Berdasarkan teori Michael Todaro, salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Namun, rusaknya jalan di Desa

c. Aksesibilitas Publik

Jalan yang rusak menyebabkan anak-anak sekolah harus berjalan kaki dengan jarak yang lebih jauh, pegawai terlambat tiba di tempat kerja, serta masyarakat kesulitan mengakses berbagai fasilitas publik seperti pelayanan kesehatan, pasar, dan perkantoran. Kondisi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar belum terpenuhi secara optimal. Berdasarkan teori Todaro, pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan infrastruktur yang layak dan merata untuk semua lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Ketika akses jalan terganggu, maka peluang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial juga ikut terhambat, sehingga tujuan pembangunan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan belum dapat tercapai secara menyeluruh.

d. Peran Koordinatif dan Pengelolaan Sumber Daya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi sebenarnya sudah dilakukan, namun pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala keterbatasan alat dan dana. Pemerintah daerah masih harus mengandalkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis dalam perbaikan infrastruktur. Hal ini memperlambat proses penanganan jalan rusak karena kebergantungan pada penyedia jasa luar daerah membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Menurut teori Todaro, lemahnya pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun peralatan, menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang lebih efektif dan efisien, termasuk peningkatan manajemen alat, penguatan kapasitas teknis daerah, serta strategi alokasi anggaran yang tepat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Pembahasan

Keterlambatan pemerintah dalam memperbaiki jalan di Desa Umelah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemangkasan anggaran. Berdasarkan teori Michael Todaro (1998), pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan infrastruktur. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues dipangkas drastis dari Rp 60 miliar menjadi Rp 6 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah harus menentukan prioritas pembangunan, sehingga Desa Umelah belum mendapatkan perhatian dalam waktu dekat.

Selain anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala utama. Banyak alat kerja milik Dinas PU yang rusak dan tidak dapat digunakan, sehingga proses perbaikan jalan menjadi tertunda. Dalam perspektif Todaro, pemerintah seharusnya mampu mengelola sumber daya secara efektif agar pembangunan dapat berjalan lancar. Namun, lemahnya pengelolaan alat dan kemampuan teknis menghambat pelaksanaan perbaikan, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung berupa terganggunya mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah skala prioritas penanganan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memfokuskan perbaikan pada wilayah yang dianggap lebih mendesak, misalnya jalan menuju Kecamatan Pining yang kondisinya lebih parah. Mengingat banyaknya jalan rusak dan terbatasnya dana, Pemerintah perlu melakukan pemilihan urutan pengerjaan. Akibatnya, Desa Umelah harus menunggu giliran, sehingga keterlambatan ini bukan semata karena kelalaian pemerintah, tetapi karena penyesuaian antara kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Secara keseluruhan, berdasarkan pemikiran Todaro, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan anggaran, tetapi juga melakukan inovasi dan optimalisasi sumber daya agar pembangunan tetap berjalan merata dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta, memperbaiki sistem pengelolaan alat, atau melibatkan masyarakat melalui program padat karya. Dengan langkah tersebut, diharapkan proses perbaikan jalan dapat dipercepat sehingga akses masyarakat meningkat dan kesejahteraan lokal dapat terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam penanganan kerusakan jalan di Desa Umelah masih belum optimal. Faktor utama penyebab keterlambatan adalah pemangkasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kebijakan skala prioritas pembangunan. Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya pengelolaan sumber daya yang efektif. Pemerintah perlu mengelola sumber daya secara efisien, memperhatikan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan infrastruktur agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama, kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gayo Lues diharapkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana, peralatan, dan dukungan anggaran guna mempercepat proses perbaikan jalan, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Umelah yang sangat bergantung pada akses jalan untuk aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Selain itu, koordinasi lintas instansi perlu diperkuat agar pelaksanaan perbaikan dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

Kedua, kepada Camat Blang Pegayon diharapkan dapat berperan aktif dalam



menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten, melakukan pengawasan terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya, serta mendorong kolaborasi antarinstansi agar penanganan jalan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

Ketiga, kepada Kepala Desa (Gecik) Umelah, diharapkan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten dalam melaporkan kondisi jalan yang rusak, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian infrastruktur desa secara berkelanjutan.

Keempat, kepada masyarakat Desa Umelah, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kondisi jalan, berperan dalam kegiatan gotong royong, serta menyampaikan aspirasi atau keluhan melalui jalur resmi agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perbaikan jalan.

Kelima, kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Pegayon), diharapkan tetap memberikan pelayanan yang optimal meskipun menghadapi kendala akses jalan yang rusak. Selain itu, pegawai KUA juga dapat berkontribusi dalam menyuarakan pentingnya perbaikan infrastruktur melalui kerja sama dengan instansi terkait, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Lestari, C. A., Ummah, K., Pratiwi, N. A., & Ivanna, J. (2023). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 307–312. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4023>
- Ruben, A., Asnawi, E., & Oktapani, S. (2024). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1268>
- Afandi, S. A. (2019). Teori Pembangunan. In *Universitas Terbuka*.
- Flyvbjerg, B. (2007). Cost overruns and demand shortfalls in urban rail and other infrastructure. *Transportation Planning and Technology*, 30(1), 9–30. <https://doi.org/10.1080/03081060701207938>
- Idris, K. S. dan S. H. (2014). Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(1).
- Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 137–151. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/5153>
- Kamaruddin, K., Haryadi, W., & Wahyudi, M. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 260–267. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.511>
- MT. Priana Eka, S. I. (2018). Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Padang Panjang). *Rang Teknik Journal*, 1(1), 86–89.

- Nilawati, Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. ... *Administrasi Publik (KIMAP)*, 2, 1859–1873. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ritonga, W. W. (2021). Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam. *Islam & Contemporary Issues*, 1(2), 47–53. <https://doi.org/10.57251/ici.v1i2.91>
- Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(1), 104–116. <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14058>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Tui, F. P., Ilato, R., Isa, R., & Abdussamad, J. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 332–342. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.682>
- Weiss, J., & Ward, K. (2012). Projects and risk. *Current Issues in Project Analysis for Development, 1998*, 123–135. <https://doi.org/10.4337/9781781002599.00010>
- Wijaya, I. S. (2020). Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan, XVIII*(VOL 17, NO 1 JUNI (2015): LENTERA), 53–61. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/lentera_journal/article/view/428
- Anugrah, Purwanto, Suyoto, T. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan First Media di Pondok Aren Tangerang Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1–17.
- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 59–70. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i1.3373>
- Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233. <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Sulistiyawati. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>